

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Konflik merupakan bentuk fenomena nyata yang terjadi di berbagai belahan dunia dan tidak dapat dihindarkan. Di balik konflik - konflik yang terjadi, tentunya tak jauh dari adanya keterlibatan aktor – aktor dunia yang memiliki kepentingan – kepentingan yang ingin dicapainya. Yang mana pada dasarnya para aktor tersebut akan melakukan berbagai bentuk usaha maupun cara guna mencapai kepentingan masing - masing secara tertata dan memastikan bahwa kepentingan mereka aman terkendali terlepas dari kondisi yang ada. Tentunya dari banyaknya aktor – aktor yang mempunyai kepentingan yang harus dicapai, namun tidak semuanya memiliki tujuan yang sama atau bahkan memiliki cara pandang maupun jalan yang berbeda dalam mencapai kepentingan tersebut.

Dari perbedaan tujuan yang tidak sejalan inilah konflik bisa terlahir, konflik sendiri terjadi karena adanya ketidakseimbangan antar hubungan tingkat organisasi, kelompok, maupun perseorangan dan baik dalam bentuk kekuasaan, hubungan sosial, ekonomi maupun kesenjangan sosial dan keadilan maupun kemakmuran yang tidak merata. ¹

¹ Simon Fisher dkk., *Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak*, alih bahasa S.N. Kartikasari dkk., dari edisi asli *Working with Conflict: Skill and Strategies for Action* (Jakarta: The British Council Indonesia, 2001), hal 4.

Dengan adanya perbedaan dan kesenjangan yang terjadi, nantinya hal ini yang akan menjadi pemantik dari merambahnya konflik – konflik tersebut menjadi suatu fenomena yang besar. Dikarenakan perbedaan tersebut dapat dianggap sebagai sebuah ancaman bagi para aktor – aktor lainnya dan menghalangi mereka dalam mencapai kepentingannya. Bahkan tak jarang perbedaan tujuan kepentingan para aktor – aktor yang terlibat nantinya berakibat pada konflik yang berkepanjangan, dan tentunya hal tersebut dapat menjadi hal buruk bagi kesejahteraan negara maupun aktor – aktor yang bersangkutan. Apabila memang sampai harus terjadi konflik berkepanjangan tersebut, tentunya akan mendatangkan dampak buruk yang berkepanjangan juga kedepannya bahkan bisa berakhir pada keputusan berperang apabila memang negosiasi antara para negosiator tidak berhasil dan gagal dalam menjalankan misi diplomasinya. Dengan gagalnya suatu negosiasi, hal tersebut bisa menyebabkan kemungkinan konflik yang lebih berbahaya dan beresiko, hingga membuat dampak yang semakin memburuk dan akan berakhir pada dampak negatif yang berkepanjangan.

Penyebab terlahirnya suatu konflik yang berkepanjangan tidaklah pernah tunggal, namun selalu beragam. Maka dari itu seringkali hal ini menyebabkan kesulitan tersendiri dalam penyelesaian suatu konflik. Dari fenomena konflik berkepanjangan tersebut, tidak hanya memakan banyak korban jiwa namun juga banyak yang akhirnya kehilangan tempat tinggal dan berakhir mengungsi ke negara lain untuk mencari perlindungan.

The Arab Spring merupakan suatu fenomena besar, yang mana terjadi pada awal tahun 2010 hingga 2011. Hal ini merupakan sebuah aksi gerakan massal yang melakukan demonstrasi dalam menuntut adanya perubahan dalam tatanan sosial politik. Lonjakan demonstrasi ini ditujukan kepada para aktor dari pemerintahan yang berwenang pada saat itu, yang hanya berfokus pada pencapaian kepentingannya saja. Gerakan lonjakan demonstrasi ini lah yang pada akhirnya menjadi gelombang revolusi.

Diawali dari aksi yang dilakukan oleh seorang warga sipil dari Tunisia bernama, Mohammed Bouazizi dimana Bouazizi melakukan *self-immolation* atau aksi membakar diri yang diakibatkan oleh perlakuan tidak adil para aparat kepada Bouazizi yang merupakan seorang pedagang kaki lima. Bouazizi diperlakukan dengan kasar dan tidak adil oleh para aparat yang bertugas di daerah tempat Bouazizi berjualan, setelah mendapatkan perlakuan tidak mengenakan tersebut Bouazizi tidak tinggal diam dan memutuskan untuk memberikan pengaduannya kepada Gubernur Sidi Bouzid. Namun nyatanya pengaduan Bouzizi tidak didengar dan tidak ditanggapi secara serius oleh Gubernur dan bahkan Gubernur sendiri menolak untuk mendengar pengaduan tersebut.

Hal ini lah yang akhirnya membuat Bouazizi yang sudah putus asa atas situasinya saat itu, memutuskan untuk membakar dirinya di depan kantor Gubernur pemerintah daerah, Sidi Bouzid.² Situasi inilah yang akhirnya

² Sahide Ahmad, dkk. 2015. *The Arab Spring : Membaca Kronologi dan Faktor Penyebabnya*. Jurnal Hubungan Internasional Vol. 4 No. 2.

menjadi pemicu dari aksi gerakan demonstrasi besar – besaran hingga ke Kawasan Timur Tengah lainnya termasuk salah satunya terjadi Suriah.

Di Suriah sendiri, yang menjadi penyebab dari adanya demonstrasi adalah rasa ketidakpuasan atas kebijakan pemerintah Suriah, tepatnya pemerintahan Bashar Al- Assad yang akhirnya melahirkan gelombang revolusi cukup besar di negara tersebut. Suriah sendiri dianggap kebal akan revolusi, dan menjadi negara dengan pemberontakan terlama atau berkepanjangan dikarenakan konflik internal yang tak kunjung usai. Sebelumnya terdapat perbandingan – perbandingan yang dilontarkan atas bentuk pemerintahan dari pemimpin yang sebelumnya. Seperti saat kepemimpinan Hafeez Al – Assad yang kerap dibandingkan dengan kepemimpinan Bassar Al – Assad saat itu, dimana Bassar Al-Assad dikenal sebagai pemimpin yang memiliki gaya hidup *glamour* atau berkelas yang mengakibatkan masyarakat berasumsi bahwasanya segala bentuk kekayaan yang dimiliki Bassar Al – Assad merupakan hasil dari uang rakyat yang telah dikorupsi. Hal ini menjadi faktor dari krisis perekonomian yang melanda, ditambah dengan kondisi rezim pemerintahan yang dipenuhi dengan korupsi dan para pemerintahan yang haus akan suap -menyuap mengakibatkan krisis ekonomi dan ketidakmakmuran bagi warga di Suriah di bawah kepemimpinan Bassar Al – Assad.

Dengan terdapatnya situasi politik yang diskriminatif, politik elite hingga perpolitikan antar kelompok semakin membuat kondisi di Suriah menjadi menegangkan. Keadaan dan situasi politik sendiri sangatlah berpengaruh terhadap jalannya suatu negara, berbeda dengan Suriah dimana semenjak

keberhasilan kudeta yang dilakukan oleh Hafeez Al – Assad sendiri dimana terlahir sebuah partai yang bernama Partai Ba’ath yang didominasi oleh kelompok Alawie yaitu sebuah kelompok minoritas dan akhirnya memonopoli perpolitikan di Suriah. Hal ini membuat perpecahan dimana lahirlah demonstrasi anti – pemerintah di tahun 2011 yang mengawali konflik internal antara pendukung rezim dan kelompok oposisi.

Tahun 2011 menjadi puncak daripada demonstrasi, yang mana demonstrasi tersebut dilakukan secara damai guna menanggapi penangkapan 15 orang anak laki – laki yang ditahan setelah menuliskan grafiti yang mendukung *Arab Spring*. Dan salah satu dari anak – anak tersebut dinyatakan mendapatkan penyiksaan yang brutal hingga mengakibatkan dirinya tewas.³ Proses demonstrasi tersebut berjalan dengan damai, bahkan hingga protes – protes selanjutnya namun Pemerintahan Assad merespon protes tersebut dengan kekerasan. Para pasukan keamanan melakukan pemukulan dan menembaki para demonstran hingga adanya aksi penangkapan besar – besaran kepada para demonstran. Pada Juli 2011, munculah sekelompok pemberontak dari suatu kalangan yang menamai diri mereka sebagai *Free Syrian Army* (FSA). FSA sendiri dibentuk oleh tantara yang berbasis di Turki dan dipimpin oleh Kolonel Riad al – Asaad. FSA telah berkembang secara signifikan sejak kemunculannya pada musim panas 2011 kelompok ini memiliki tujuan yakni

³ Joe Sterling, “*Daraaa: The spark that lit the Syrian flame*”, CNN, 1 Maret 2012, dalam <https://edition.cnn.com/2012/03/01/world/meast/syria-crisis-beginnings/index.html> diakses pada 20 November 2021

menggulingkan Pemerintahan Assad, yang akhirnya menjadi awal dari perang saudara di Suriah.⁴

Konflik internal yang terjadi di Suriah sendiri, bermula dari masalah non – sektarian yang pada akhirnya mengalami perkembangan hingga membuat situasi semakin suram dan memperpanjang konflik tersebut. Kebanyakan dari masyarakat Suriah sendiri menganut pada ajaran Sunni, sedangkan pihak pemerintahan Suriah seperti yang sudah disampaikan sebelumnya mayoritas menganut ajaran Alawi. Para pasukan Keamanan Suriah sendiri, bagi yang menganut ajaran Alawi sering kali melakukan kekerasan terhadap masyarakat yang mayoritas penganut ajaran Sunni. Hal inilah yang menjadi pemantik dari pada kobaran kebenciann masyarakat terhadap Pemerintahan Suriah. Dengan meningkatnya aksi – aksi demonstrasi yang dilakukan masyarakat, yang tentunya mengalami peningkatan intensitas baik dari segi jumlah maupun kekuatan membuat Pemerintahan Suriah geram. Menanggapi hal tersebut, akhirnya pemerintah Suriah memutuskan untuk mengambil tindakan kekerasan dengan menurunkan pasukan keamanan yang lebih keras bahkan hingga menurunkan artiteli, tank, bahkan helikopter yang biasa digunakan untuk perang guna mengepung kota – kota yang menjadi pusat demonstrasi hal ini dilakukan agar demonstrasi tersebut tidak meluas ke kota – kota lain.

Demonstrasi yang dilakukan tersebut tidak hanya berupaya guna menurunkan kekuasaan presiden Bashar Al – Assad yang sudah berkuasa

⁴ Al Jazeera News, “*Syria’s civil war explained from the beginning* “. Al Jazeera, 14 April 2018, dalam <https://www.aljazeera.com/news/2016/05/syria-civil-war-explained-160505084119966.html> diakses pada 20 November 2021

kurang lebih selama 11 tahun lamanya namun juga sebagai bentuk rasa kekecewaan masyarakat Suriah terhadap pemerintahan Al – Assad yang tidak sesuai dengan harapan mereka. Bassar sendiri juga tidak dapat memenuhi janjinya yaitu untuk lebih demokratis dalam memimpin, namun kenyataannya Bassar gagal dalam mencapai hal tersebut diakrenakan adanya tekanan politik yang akhirnya menjadikan pemerintahannya semakin menjadi otoriter dan membuat masyarakat takut serta tunduk pada Bassar Al – Assad.⁵

Dari adanya konflik yang terjadi dan tingkat kekerasan yang semakin meningkat hal ini diakibatkan oleh Bassar Al-Assad sendiri karena gagal menggunakan kewenangan miliknya dengan bijak. Dari konflik tersebut dan kondisi yang tidak kunjung membaik, pada akhirnya menjadi sebuah ancaman besar bagi keselamatan warga sipil di Suriah. Konflik yang berkepanjangan ini dapat memicu adanya krisis kemanusiaan di Suriah. Kondisi ini bisa berakibat fatal pada perampasan hak asasi manusia terhadap warga sipil Suriah dikarenakan konflik berkepanjangan yang terus terjadi baik yang dilakukan oleh suatu kelompok maupun yang perorangan. Dengan kondisi demikian, banyak dari masyarakat Suriah yang memilih untuk meninggalkan negaranya menuju ke negara – negara yang memang berbatasan langsung dengan negaranya dengan harapan mendapatkan perlindungan serta tempat tinggal.

Beberapa negara – negara yang dituju oleh para pengungsi Suriah sendiri ialah Lebanon, Turki, Yordania, Irak dan Mesir. Negara – negara tersebut

⁵ Miftahul Ghani Saputra, *Keterlibatan Rusia dalam Perang Sipil Suriah Tahun 2011 – 2016*, hal.274, Jurnal Analisis Hubungan Internasional, Vol 7 No.3, 2018.

dapat dibilang sebagai negara yang menjadi tujuan utama para pengungsi Suriah guna mencari perlindungan dan juga menghindari konflik. Para pengungsi Suriah pun mengungsi ke negara – negara tersebut baik melalui jalur darat maupun laut.⁶ Alhasil dengan pecahnya konflik di Suriah sejak tahun 2011 tersebut, mengakibatkan gelombang pengungsi ke negara - negara tetangganya.

Berdasarkan laporan United Nation High Commissioner for Refugees (UNHCR) pada tahun 2011 – 2012,⁷ bahwasanya jumlah pengungsi Suriah di beberapa wilayah tetangga mencapai 515.061. Dalam kurun waktu yang dekat jumlah pengungsi tersebut semakin mengalami lonjakan kurang lebih tiga tahun selama konflik berlangsung. Lalu dalam laporan UNHCR di tahun 2013 dinyatakan bahwasanya terdapat lonjakan gelombang pengungsi sehingga terhitung jumlah pengungsi di Suriah pada negara – negara tetangga Suriah sendiri mencapai 2.352.426 jiwa dengan tingkat jumlah pengungsi tertinggi terdapat pada negara Turki sebanyak 352.242 jiwa dan Lebanon sebanyak 858.641 jiwa. ⁸

Menurut data UNHCR pada tahun 2011 sampai dengan 2013, dinyatakan bahwasanya Lebanon merupakan salah satu negara yang menjadi tujuan utama

⁶ World Vision, *Syrian refugee crisis: Facts, FAQs, and how to help*, 2020, diakses dari <https://www.worldvision.org/refugees-news-stories/syrian-refugee-crisis-facts#where> pada 20 November 2021.

⁷ United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), “ *Stories from Syrian Refugees, Discoverng the human faces of a tragedy*” diakses pada 20 November 2021.

⁸ United Nations High Commisioner for Refugees (UNHCR), *Syria Regional Response, 2013 Final Report*, (Geneva: UNHCR, 2013) :hal 1.

gelombang pengungsi terbesar dibandingkan dengan negara tetangga lainnya. Lonjakan gelombang pengungsi Suriah yang masuk ke Lebanon ini, dikarenakan faktor geografis yang mana Lebanon sendiri berbatasan langsung dengan Suriah tepatnya di bagian Utara dan Timur. Hal tersebut yang membuat mayoritas dari pada pengungsi Suriah memutuskan tujuan mereka ke wilayah – wilayah Lebanon seperti pada wilayah Lebanon Selatan yaitu Beirut, dan Lebanon Utara yaitu Bekka.⁹

Namun bukan hanya mengenai faktor geografis yang terbilang dekat namun juga karena terdapat kemiripan dalam perhal sosial budaya serta agama masyarakat Lebanon dengan masyarakat Suriah yang membuat masyarakat Lebanon dapat menerima para pengungsi Suriah masuk ke negaranya. Lebanon sendiri telah memberikan perhatian yang serius dalam penanganan pengungsi Suriah. Bentuk perhatian yang serius dari Lebanon ini terbentuk karena hubungan yang dimiliki oleh Lebanon dan Suriah yang dekat dan juga latar belakang geografis maupun historis yang memiliki kesamaan. Oleh karena itu guna memberikan bantuan kepada para pengungsi Suriah, Lebanon pun membuat kebijakan – kebijakan salah satunya dengan membukakan perbatasan dan memberika bantuan kepada para pengungsi secara langsung. Seperti halnya bantuan langsung yang diberikan oleh masyarakat Lebanon adalah dengan memberikan atau menyediakan tempat tinggal bersama dengan kerabat maupun teman, lalu menyewakan bangunan kosong dan membukakan

⁹ World Vision Lebanon, “ *Advocacy Report Under Preasure : the impact of the Syrian refugee crisis on host communities in Lebanon*, “ World Vision Lebanon (July 2013):hal 9.

tenda di tanah milik masyarakat Lebanon itu sendiri dan juga bahkan berbagi sumber daya pokok seperti air, listrik hingga menerima hak maupun kebijakan baru guna mengakses bantuan pelayanan kesehatan serta tempat tinggal.¹⁰

Walaupun dengan fakta demikian, nyatanya Lebanon sendiri bukanlah bagian negara yang ikut meratifikasi Konvensi 1951 mengenai pengungsi. Tidak hanya itu, Pemerintah Lebanon juga masih belum memiliki perundang – undangan serta peraturan yang efektif mengenai pengungsi. Hal ini membuat pemerintah Lebanon tidak memiliki kewajiban serta tanggung jawab penuh terutama dalam penanganan pengungsi di negaranya dan Lebanon juga tidak bisa mendapatkan bantuan internasional melalui UNHCR dalam mengupayakan penanganan pengungsi.

Disatu sisi, Lebanon faktanya merupakan negara peratifikasi Universal Declaration of Human Rights di tahun 1948 mengenai pernyataan hak asasi manusia hal ini membuat Lebanon tidak bisa begitu saja menolak, ataupun mengembalikan pengungsi ke tempat asalnya dimana para pengungsi ini berhadapan dengan hal – hal yang sekiranya mengancam serta membahayakan hidup mereka (*non – refoulement*). Dengan ketidakikutsertaan Lebanon dalam ratifikasi Konvensi 1951 , membuat *United Nation High Commissioner for Refugees* (UNHCR) sebagai badan internasional yang bertugas menangani pengungsi internasional ini menjadi tidak leluasa dalam menjalankan tugasnya. Dengan meningkatnya gelombang pengungsi yang terus terjadi dalam kurun tiga tahun selama konflik di Suriah berlangsung, hal

¹⁰ World Vision Lebanon “ *Advocacy Report Under Pressure* “. hal 5.

ini pada akhirnya mengakibatkan permasalahan tersendiri bagi Lebanon. Bentuk permasalahan yang timbul di Lebanon sendiri tepatnya pada tahun 2018 yaitu seperti adanya permasalahan sosial antara pengungsi Suriah dengan masyarakat Lebanon terutama hal ini diakibatkan oleh masalah tempat tinggal dan juga masalah kesehatan. Selain itu terdapat penurunan dana untuk pengungsi hingga kebijakan yang sangat kontroversial yang diberikan oleh Keamanan Umum negara Lebanon yaitu dengan mengembalikan pengungsi ke Suriah, ditengah ketegangan yang berlangsung antara Pemerintahan Luar Negeri Lebanon dengan Komisararis Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) atas keputusan pemulangan pengungsi tersebut.¹¹

Meskipun dengan kondisi demikian, kehadiran pengungsi Suriah di Lebanon sendiri membuat negara tersebut tetap aktif dalam penerimaan pengungsi Suriah dan juga tetap berperan dalam menyediakan fasilitas serta berkoordinasi dengan (*United Nations High Commissioner for Refugee*) UNHCR. Lebanon sendiri terikat dengan prinsip non refolement dan juga deklarasi hak asasi manusia beserta (*Memorandum of Understanding*) atau MOU dengan UNHCR terkait penanganan pengungsi. Maka dengan itu, guna menanggapi lonjakan arus pengungsi Suriah yang masuk ke dalam wilayah Lebanon pemerintah Lebanon baik melalui Kementerian Sosial, Kementerian Luar Negeri dan juga Kementerian Keamanan berkoordinasi dan bekerjasama

¹¹ Executive. The Syrian refugee crisis in Lebanon. 2018. <https://www.executive-magazine.com/economics-policy/the-syrian-refugee-crisis-in-lebanon> . Diakses pada 19 April 2022.

dengan UNHCR dalam memberikan fasilitas dan perlindungan bagi para pengungsi di Suriah.

UNHCR merupakan sebuah unit dari PBB yang memang khusus menangani mengenai permasalahan pengungsi. UNHCR juga merupakan suatu organisasi internasional yang memiliki mandat khusus dalam upaya penanganan permasalahan pengungsi. Isi dari pada mandat khusus tersebut adalah mencari solusi yang berkelanjutan seperti *repatriation* (pemulangan pengungsi ke negara asalnya), *integration* (integrasi di negara pemberi suaka), dan *resettlement* (pemukiman kembali ke negara ketiga). Selain mencari solusi yang berkelanjutan UNHCR juga memiliki tugas dalam menyediakan bantuan jangka pendek yang mana baik bersifat material maupun non-material guna melakukan penanganan terhadap pengungsi Suriah. Dengan terus meningkatnya kenaikan jumlah pengungsi Suriah di Lebanon tentunya bantuan dari UNHCR sangatlah dibutuhkan dalam penanganan tersebut. Terutama dalam mengkoordinasi berbagai macam bantuan mulai dari bantuan perlindungan hingga pencarian solusi bagi para pengungsi dan juga disesuaikan dengan mandat khusus yang telah diberikan oleh PBB dan dilakukan atas nama kemanusiaan.

1.2. Rumusan Masalah

Dengan semakin meningkatnya ketegangan konflik yang terjadi di Suriah, membentuk penurunan daya atas keamanan yang tercipta. Kondisi tersebut memaksa para warga Suriah untuk segera berfikir mengenai jalan keluar dari situasi tersebut. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan

melakukan upaya pengungsian ke negara – negara tetangga dan mendapatkan status sebagai pengungsi. Opsi ini merupakan opsi yang mayoritas diambil oleh para pengungsi Suriah sebagai upaya dalam bertahan hidup dan tentunya mencari perlindungan.

Melihat kondisi dan juga situasi yang tidak kunjung memulih, akhirnya membuat para warga sipil Suriah semakin berputus asa dan memilih untuk bergantung kepada bantuan – bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak. Salah satu pihak yang memberikan bantuan kepada para pengungsi Suriah adalah sebuah organisasi internasional yang bernaung di bawah PBB yaitu UNHCR dimana organisasi ini memiliki fokus terhadap penanganan pengungsi maupun pencari suaka. Tidak hanya itu, UNHCR sendiri juga berperan dalam membantu pemerintahan Lebanon dalam menangani isu lonjakan pengungsi Suriah yang terjadi di Lebanon.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis membentuk suatu rumusan masalah, yaitu **“Bagaimana kontribusi daripada peranan UNHCR dalam menangani krisis pengungsi Suriah di Lebanon pada tahun 2018 – 2020?”** Dan untuk menjawab pertanyaan utama penelitian ini, terdapat sejumlah pertanyaan - pertanyaan operasional penelitian untuk membantu menjawab pertanyaan penelitian, antara lain :

1. Bagaimana perubahan dampak yang dihasilkan dari upaya dan kontribusi yang dilakukan UNHCR pada krisis refugee Syria yang terjadi di Lebanon dalam kurun waktu 2018 – 2020?

2. Apakah UNHCR telah berhasil menjalankan tugas dan fungsinya dalam memberikan penanganan dan kontribusi pada permasalahan krisis refugee Syria di Lebanon?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian diatas berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan adalah sebagai berikut :

1. Menjelaskan mengenai konflik yang terjadi di Suriah beserta dampak yang diakibatkan daripada konflik tersebut
2. Mengetahui tindakan yang telah dilakukan oleh pihak Pemerintahan Lebanon dan juga UNHCR dalam menangani pengungsi Suriah di Lebanon.
3. Mengetahui efektifitas serta peranan daripada UNHCR dalam menangani pengungsi Suriah tepatnya yang berada di Lebanon.

1.4. Kegunaan Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, maka terdapat beberapa manfaat dan juga kegunaan antara lain yaitu :

Menambah referensi dan kepustakaan Ilmu Hubungan Internasional yang menyangkut dengan pengungsi maupun peranan UNHCR sebagai suatu organisasi Internasional yang berfokus pada penanganan pencari suaka dan pengungsi terutama pada suatu konflik. Memberikan informasi serta pandangan bagi pembaca yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai konflik

yang terjadi di Suriah serta peranan UNHCR terhadap pengungsi Suriah yang bertempat di Lebanon pada tahun 2018 – 2020.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang penulis gunakan dalam penelitian ini akan ditulis dalam satu bab dengan pembahasan sebagai berikut :

1. Pada bab I berisi mengenai latar belakang permasalahan serta pokok masalah yang mana selanjutnya akan diteliti oleh penulis. Dilanjutkn dengan tujuan penelitian, kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan pada penelitian ini, berdasarkan pada kasus yang penulis angkat.
2. Pada bab II berisi mengenai kajian pustaka yang mana mendukung penulisan penelitian ini, pada kajian pustaka terdapat penelitian terdahulu yang relevan beserta kerangka teori yang akan digunakan dalam penelitian ini.
3. Pada bab III berisi metodologi penelitian yang menjelaskan mengenai metode penelitian kualitatif yang nantinya digunakan pada penelitian ini. Terdapat pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik pengolahan data dan analisis.
4. Pada bab IV berisikan gambaran terkait konflik yang terjadi di Suriah, dan Lebanon yang menjadi negara penerima para pengungsi dari Suriah. Dan peranan UNHCR sebagai sebuah organisasi internasional yang berupaya dalam menangani para

pengungsi. Dan pada pembahasan bab ini, juga terdapat analisa dari aktor organisasi internasional yaitu peranan UNHCR dalam menangani krisis pengungsi Suriah di Lebanon pada tahun 2018 – 2020.

5. Pada Bab V berisi mengenai kesimpulan dari pada hasil penelitian oleh penulis terkait peranan UNHCR dalam menangani krisis pengungsi Suriah di Lebanon tahun 2018-2020.

